

DAMPAK PENGHAPUSAN SUBSIDI BBM TERHADAP SURPLUS EKONOMI

Oleh :

M. Astri Yulidar Abbas SE.,MM*

Erni Setiawati SE

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Email : threejuli@gmail.com

Abstract

Selama ini pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, namun anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM jelas Jokowi saat mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi di Istana Negara pada 17 November silam. Berdasarkan perhitungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pemerintah telah menggelontorkan uang Rp 1.300 triliun untuk subsidi BBM dalam lima tahun terakhir. Angka itu [jauh lebih besar dari anggaran infrastruktur](#) dan kesehatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kalau dibandingkan untuk bangun infrastruktur kalah besar. Untuk anggaran kesehatan saja hanya Rp 400 triliun untuk lima tahun terakhir. Ini jumlah yang dibakar malah lebih besar dibanding untuk mengurus kesejahteraan rakyat," tandas Sudirman.

Kini dengan adanya kenaikan harga tersebut, subsidi tidak dihilangkan tetapi hanya dialihkan ke hal yang produktif. Bagaimana tidak, Kementerian Keuangan menghitung kenaikan harga BBM akan menyumbang penghematan hingga Rp 140 triliun pada tahun depan.

Key Word : Subsidi BBM, Surplus Ekonomi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara pengimpor minyak bumi tapi memberikan subsidi BBM pada rakyatnya, sebetulnya sudah merupakan anomali. Apalagi bila mendengarkan pidato presiden Jokowi di APEC bahwa nilai subsidi itu hampir sebesar 1/6 anggaran negara, dan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2000 per liter ini hanya mampu memangkas subsidi kurang lebih Rp. 100 triliun, sisanya masih disubsidi.

Yang disayangkan adalah kesadaran betapa nasib kita ada di ujung tanduk energi ini. Krisis listrik dan krisis BBM tidak ada yang peduli tapi bila terjadi kenaikan harga BBM baru semua berloncatan dari kursinya, lalu kemudian sepi dan kehidupan konsumtif terus berjalan seperti biasa, sementara kran energi terus dibiarkan bocor.

Krisis kuota BBM bersubsidi dan menggelembungnya subsidi BBM ini sebetulnya sudah terjadi saat SBY mau lengser, namun keputusan tidak populis untuk menaikkan harga BBM ini tidak berani diambil oleh SBY. Lengser dengan tenang tanpa keributan (walaupun anggaran bergejolak) tentu mampu menjaga *image* setiap pemimpin. Bahwa Jokowi berani mengambil keputusan tidak populis ini lalu mengumumkannya sendiri bukan menteri atau menkunya sungguh patut diacungi jempol.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, kemana penghematan Rp 100 triliun ini akan disalurkan? Bahwa subsidi BBM akan dikurangi dan disalurkan untuk pembangunan sudah presiden Jokowi umumkan di APEC beberapa hari sebelumnya, diantaranya untuk; pembangunan infrastruktur 24 pelabuhan termasuk pelabuhan laut dalam di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Perluasan jalur kereta api serta pembangunan sarana transportasi massal di enam kota besar Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Proyek infrastruktur lain akan mencakup pembangkit listrik demi memajukan sektor industri dan manufaktur Indonesia. Perbaikan pertanian; membangun 25 dam dalam lima tahun untuk memperbaiki dan menjamin ketersediaan air di perkebunan para petani. Kesejahteraan para nelayan; penyediaan mesin perahu dan pendingin ikan. Bantuan untuk para pebisnis di industri mikro dan menengah. Untuk peningkatan kualitas di bidang pendidikan dan kesehatan.

100 triliun rupiah bukan angka yang kecil, apalagi aturan pembelian BBM bersubsidi tidak berjalan benar selama ini dan tetap saja subsidi paling banyak diterima oleh golongan menengah ke atas, yang memiliki satu bahkan lebih mobil di garasinya dan pencuri BBM bersubsidi. Sementara nasib infrastruktur, petani, nelayan, pembangkit listrik, pengusaha kecil? Masih saja jalan di tempat, jadi yang perlu dikawal itu bukanlah kenaikan harga BBM tapi penerapan 100 triliun rupiah hasil penghematan subsidi di atas bersesuaian dengan yang disebutkan di APEC.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menaikkan [harga bahan bakar minyak \(BBM\) bersubsidi](#) untuk jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter. Langkah tersebut diambil karena selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran. Indonesia terus membakar ratusan triliun uang buat memberi subsidi BBM padahal negeri ini membutuhkan dana besar untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur.

Selama ini pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, namun anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM jelas Jokowi saat mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi di Istana Negara pada 17 November silam. Berdasarkan perhitungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pemerintah telah menggelontorkan uang Rp 1.300 triliun untuk subsidi BBM dalam lima tahun terakhir. Angka itu [jauh lebih besar dari anggaran infrastruktur](#) dan kesehatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kalau dibandingkan untuk bangun infrastruktur kalah besar. Untuk anggaran kesehatan saja hanya Rp 400 triliun untuk lima tahun terakhir. Ini jumlah yang dibakar malah lebih besar dibanding untuk mengurus kesejahteraan rakyat," tandas Sudirman.

Kini dengan adanya kenaikan harga tersebut, subsidi tidak dihilangkan tetapi hanya dialihkan ke hal yang produktif. Bagaimana tidak, Kementerian Keuangan menghitung kenaikan harga BBM akan menyumbang penghematan hingga Rp 140 triliun pada tahun depan.

Indonesia sudah lama menerapkan subsidi kepada produsen dan subsidi dalam bentuk barang sehingga sejak zaman pemerintahan Orde Baru (Presiden Soeharto), rakyat menikmati harga BBM yang murah, sembako murah, listrik murah, transportasi murah, dan sebagainya. Sehingga timbul anggapan bahwa hidup di zaman pemerintahan Soeharto lebih enak. Benarkah demikian? Bukankah rezim subsidi ini hanya ibarat "direbus pelan-pelan", yang baru terasa sakit ketika suhu air sudah sangat tinggi?

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Dampak Penghapusan Subsidi BBM Terhadap Surplus Ekonomi”*

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada Bab Pendahuluan maka rumusan masalah dari penelitian kami ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak penghapusan subsidi BBM terhadap surplus ekonomi?
2. Seberapa besar hilangnya surplus ekonomi akibat penghapusan subsidi BBM (BBM Non Subsidi)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak penghapusan subsidi BBM terhadap surplus ekonomi?
2. Untuk menghitung besarnya kehilangan/berkurangnya surplus ekonomi akibat penghapusan subsidi BBM?

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Subsidi

Menurut Wikipedia Indonesia, “Subsidi” (juga disebut *subvensi*) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.

Subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.

Bentuk Subsidi.

Subsidi dapat dibedakan menjadi dua macam;

- 1) Subsidi dalam bentuk cash transfer.
- 2) Subsidi dalam bentuk barang.

Subsidi dalam bentuk uang diberikan pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang yang diproduksinya. Pemberian subsidi kepada konsumen akan memberikan tambahan kebebasan dalam pembelanjannya, contoh: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Pengertian BBM subsidi dan BBM non subsidi

BBM Subsidi adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Pengertian subsidi itu sendiri adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha. Tujuannya adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan daya beli. Sementara untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran, subsidi juga diperlukan agar usaha tersebut tetap menjadi tumpuan hidup banyak orang.

Dalam hubungannya dengan bahan bakar minyak, hal serupa juga diterapkan oleh pemerintah pada produk BBM yang dikonsumsi masyarakat. Dengan kata lain *pengertian BBM subsidi* adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga di bawah harga bahan bakar dunia. Hal ini dikarenakan rakyat telah mendapatkan bantuan dana dalam bentuk potongan harga sebelum BBM sampai ke tangan konsumen. Potongan biaya tersebut termasuk dalam proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan bakar minyak ke tangan konsumen. Pemerintah menerapkan demikian karena BBM dinilai sebagai salah satu komoditas primer yang harus diberikan subsidi agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan.

Selain BBM subsidi, juga terdapat BBM non-subsidi yang tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dengan konsekuensi harganya tentu lebih mahal dan kualitas minyak non-subsidi adalah lebih baik dibanding BBM subsidi. Menjadi sorotan selama ini adalah mengenai fokus sasaran dari BBM subsidi. Pemerintah memberlakukan kebijakan BBM subsidi sebenarnya ditujukan untuk rakyat dengan kemampuan daya beli rendah, dalam hal ini mereka yang berada di level ekonomi bawah. Namun kenyataannya konsumen dari BBM subsidi masih banyak yang berasal dari kalangan mampu bahkan beberapa kendaraan mewah dan milik pemerintah juga tak jarang menggunakan bahan bakar subsidi tersebut. Karena itu perlu "diredefinisi" atau dirumuskan ulang apa, bagaimana, kenapa dan untuk siapa subsidi itu jika mengacu pada pengertian BBM Subsidi.

Alasan kenapa pemerintah harus memberi subsidi terhadap BBM yang menjadi konsumsi rakyat? Berikut penjelasannya. Sejarah pemberian subsidi BBM sudah sangat panjang. Di masa lalu, struktur ekonomi Indonesia berbeda. Kala itu, negara mampu menanggung subsidi BBM karena Indonesia adalah eksportir minyak. Sehingga, setiap kenaikan harga minyak selalu menjadi tambahan pendapatan bersih bagi negara. Kini, Indonesia sudah menjadi negara importir minyak dan kita juga sudah keluar dari OPEC, organisasi Negara negara pengeksportir minyak sejak 2008.

METODE PENELITIAN

Studi Literatur

Studi Literatur digunakan untuk mendapatkan teori dan konsep, model maupun komponen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini teori dan konsep yang digunakan adalah tentang harga bbm subsidi dan non subsidi, serta jumlah permintaan dan penawaran pasar guna menganalisa pergeseran kurva keseimbangan pasar akibat dari dihapusnya subsidi bbm.

Identifikasi Data yang diperlukan

Tahap ini dilakukan untuk menentukan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Sesuai dengan tujuan penelitian dan alur pikir yang telah disajikan pada sebelumnya. Data utama yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data dari tahun 2005 sampai dengan 2014, yaitu :

- 1) Harga eceran per liter BBM jenis premium
- 2) Jumlah produksi BBM jenis premium (*supply*)
- 3) Jumlah konsumsi BBM jenis premium (*demand*)

Teknik Pengumpulan data

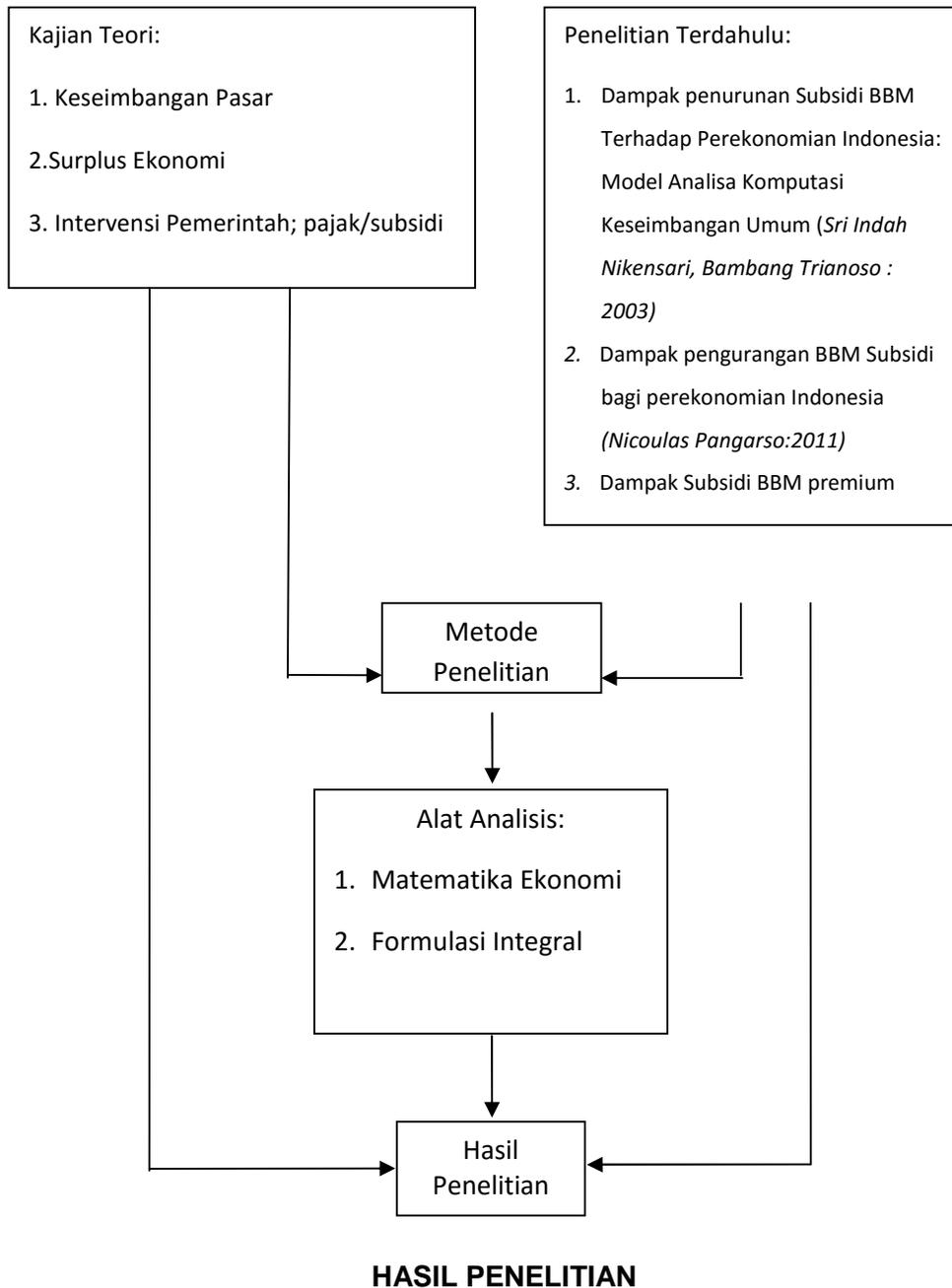
Mengumpulkan data dari sumber pihak ke dua (data sekunder). Setelah data terkumpul, akan dilakukan tabulasi dan analisa untuk membuat interpretasi serta generalisasi. Sumber data diperoleh dari sumber resmi atau web site dari instansi terkait

Analisis Data

Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Matematika Ekonomi dengan Formulasi Integral untuk menghitung Surplus Ekonomi, dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan :	C_s = Konsumen Surplus P_s = Produsen Surplus P' = Harga konsumen/produsen P_E = Harga pasa	$C_s = \int_{P_E}^{P'} f(P).dP$
		$P_s = \int_{P'}^{P_E} f(P).dP$

Kerangka Konseptual



Surplus Ekonomi

Surplus ekonomi terdiri dari surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah maksimum yang ingin dibayar oleh konsumen dengan yang benar-benar akandibayar terhadap jumlah tertentu dari produksi. Sedangkan surplus produsen adalah perbedaan antara jumlah uang yang benar-benar diterima

produsen dengan jumlah uang minimum yang diinginkan oleh produsen tersebut. Secara matematis, surplus konsumen dan produsen diukur dengan mengintegrasikan fungsi penawaran dan fungsi permintaan.

Produk	Jumlah	Tahun
Avtur	4.229.094,00 KL	2014
Premium	29.707.002,00 KL	2014
M. Bakar	1.884.040,00 KL	2014
M. Tanah	971.434,00 KL	2014
M. Solar	32.673.230,00 KL	2014
M. Bensin 92	1.062.920,00 KL	2014
M. Diesel	60.870,00 KL	2014
Avgas	1.499,00 KL	2014
M. Bensin 95	154.888,00 KL	2014
M. Bakar	1.973.903,00 KL	2013
M. Solar	24.047.721,00 KL	2013
M. Tanah	1.260.490,00 KL	2013
M. Bensin 100	41,00 KL	2013
M. Bensin 95	158.714,00 KL	2013
M. Bensin 92	850.408,00 KL	2013
Premium	29.501.773,00 KL	2013
Avtur	4.159.010,00 KL	2013
M. Diesel	79.137,00 KL	2013
Avgas	2.868,00 KL	2013
Avgas	2.606,40 KL	2012

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Rekapitulasi Data

Berikut ini kami sajikan rekapitulasi data produksi (*supply*) dan data konsumsi (*demand*) serta harga per liter BBM jenis premium

Tabel 9
Rekapitulasi Data
Produksi, Konsumsi dan Harga BBM Jenis Premium

Tahun	Produksi (Barel)	Konsumsi (Barel)	Harga Rata-rata (Rp. per liter)
			Jenis Premium
2006	71.822.000,00	107.364.550,50	4.500
2007	71.337.000,00	114.340.365,55	4.500
2008	72.404.000,00	123.903.418,70	5.000

2009	72.799.000,00	134.195.077,22	4.500
2010	66.820.000,00	155.005.604,30	4.500
2011	64.460.000,00	160.092.129,97	4.500
2012	67.684.000,00	179.007.917,79	4.500
2013	193.537.471,23	185.560.568,78	6.500
2014	185.109.125,07	186.851.420,35	8.500

Sumber : Diolah Peneliti

B. Alat Analisis

Untuk mengolah dan menganalisis data menggunakan fungsi/kurva penawaran dan fungsi/kurva permintaan, equilibrium, dan formula integral Surplus Ekonomi, dengan rumusan sebagai berikut :

$$C_s = \int_{P_E}^{P'} f(P) \cdot dP$$

Keterangan :

C_s = Konsumen Surplus

P_s = Produsen Surplus

P' = Harga konsumen/produsen

P_E = Harga pasar

$$P_s = \int_P^{P_E} f(P) \cdot dP$$

C. Pengolahan Data (worksheet)

- 1) Menentukan harga keseimbangan pasar
 Fungsi Penawaran Premium : $Q_s = 34,60P - 84.492$
 Fungsi Permintaan Premium : $Q_d = 13,37P + 79.743$
 Equilibrium : $Q_s = Q_d$
 $34,60P - 84.492 = 13,37P + 79.743$
 $34,60P - 13,37P = 79.743 + 84.492$
 $21,23P = 164.235$
 $P = 7.736$ P_E (harga pasar)
- 2) Menentukan harga konsumen, dimana $Q_d = 0$
 $Q_d = 13,37P + 79.743$
 $0 = 13,37P + 79.743$
 $-13,37P = 79.743$
 $P = - 5.964$ harga konsumen
- 3) Menentukan harga produsen, dimana $Q_s = 0$
 $Q_s = 34,60P - 84.492$
 $0 = 34,60P - 84.492$
 $-34,60P = -84.492$
 $P = 2.442$ harga produsen
- 4) Menghitung Konsumen Surplus

5) Menghitung Produsen Surplus

$$P_s = \int_{P'}^{P_E} f(P) \cdot dP$$

$$P_s = \int_{-5964}^{2442} 13,37 P + 79743 \cdot dP$$

$$P_s = 6,685 P^2 + 79743 P \Big|_{-5964}^{2442}$$

$$P_s = 472.404.003$$

$$C_s = \int_{P_E}^{P'} f(P) \cdot dP$$

$$C_s = \int_{7736}^{-5964} 13,37 P + 79743 \cdot dP$$

$$C_s = 6,685 P^2 + 79743 P \Big|_{7736}^{-5964}$$

$$C_s = -1.254.766.834$$

$$C_s = \int_{P_E}^{P'} f(P) \cdot dP$$

$$C_s = \int_{7736}^{7300} 13,37 P + 79743 \cdot dP$$

$$C_s = 6,685 P^2 + 79743 P \Big|_{7736}^{7300}$$

$$C_s = -78.592.776$$

Menghitung surplus konsumen jika harga konsumen Rp. 7.300,- (tahun 2016)

6) Harga konsumen di atas harga pasar (simulasi data misalnya Rp. 8.000,- per liter)

$$C_s = \int_{P_E}^{P'} f(P) \cdot dP$$

$$C_s = \int_{7736}^{8000} 13,37 P + 79743 \cdot dP$$

$$C_s = 6,685 P^2 + 79743 P \Big|_{7736}^{8000}$$

$$C_s = 48.823.674$$

D. Pembahasan

Dari hasil pengolahan data di atas dapat dilihat bahwa konsumen sama sekali tidak mendapatkan surplus, bahkan defisit karena surplusnya negatif. Konsumen surplus nilainya

negatif 1.254.766.834, di mana diperoleh harga pada keseimbangan pasar yaitu sebesar Rp. 7.736,- per liter. Sedangkan produsen memperoleh surplus yang sangat besar (positif) yakni 472.404.003.

Pemerintah telah membuat kebijakan dengan menghapus sebagian subsidi BBM terutama jenis premium, di mana harga eceran resmi per Juli 2016 ditetapkan Rp. 7.300,- per liter. Surplus konsumen yang diterima oleh konsumen pada tingkat harga Rp. 7.300,- per liter sebesar negatif 78.592.776. Meskipun nilainya masih negatif tetapi ada kenaikan surplus yang diterima karena surplus yang negatif tersebut berkurang, menjadi negatif 1.176.174.058.

Dengan demikian, penghapusan subsidi BBM yang dilakukan saat ini oleh pemerintah tidak menyebabkan konsumen kehilangan surplusnya, bahkan ada kenaikan surplus konsumen walaupun masih bernilai negatif. Karena harga BBM yang ditetapkan pemerintah saat ini masih di bawah harga pasar yang seharusnya.

Jika konsumen ingin nilai surplusnya tidak negatif berarti harga eceran BBM premium harus lebih besar dari harga keseimbangan pasar (harga konsumen > harga pasar). Sebagai contoh data simulasi dengan menetapkan harga BBM premium sebesar Rp. 8.000,- per liter hasilnya konsumen surplus bernilai positif sebesar 48.823.674.

KESIMPULAN

Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa konsumen sama sekali tidak mendapatkan surplus, bahkan defisit karena nilai surplusnya negatif. Konsumen surplus nilainya negatif 1.254.766.834, di mana diperoleh harga pada keseimbangan pasar yaitu sebesar Rp. 7.736,- per liter. Sedangkan produsen memperoleh surplus yang sangat besar (positif) yakni 472.404.003.

Pemerintah telah membuat kebijakan dengan menghapus sebagian subsidi BBM terutama jenis premium, di mana harga eceran resmi per Juli 2016 ditetapkan Rp. 7.300,- per liter. Surplus konsumen yang diterima oleh konsumen pada tingkat harga Rp. 7.300,- per liter sebesar negatif 78.592.776. Meskipun nilainya masih negatif tetapi ada kenaikan surplus yang diterima karena surplus yang negatif tersebut berkurang, menjadi negatif 1.176.174.058.

Dengan demikian, penghapusan subsidi BBM yang dilakukan saat ini oleh pemerintah tidak menyebabkan konsumen kehilangan surplusnya, bahkan ada kenaikan surplus konsumen walaupun masih bernilai negatif. Karena harga BBM yang ditetapkan pemerintah saat ini masih di bawah harga pasar yang seharusnya, artinya surplus konsumen akan bernilai positif jika harga eceran BBM premium lebih besar dari harga keseimbangan pasar (harga konsumen > harga pasar). Sebagai contoh data simulasi dengan menetapkan harga BBM premium sebesar Rp. 8.000,- per liter hasilnya konsumen surplus bernilai positif sebesar 48.823.674.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

Mankiw, N Gregory. 2006, Makroekonomi, Edisi 6. Jakarta, Erlangga

Murni, Asfia dan Amaliawati, Lia, 2012, Ekonomika Mikro, Bandung, Refika Aditama

Nikensari, Sri Indah dan Trianoso Bambang, Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, Volume 4 No. 1 . 2003

Pangarso, Nicoulas, Dampak Pengurangan Subsidi BBM Bagi Perekonomian Indonesia, www.academia.edu, 2011

Rosyidi, Suherman, 2009, Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro, Jakarta, Rajawali Pers.

Riyanto, Wahyu Hidayat, 2002, Matematika Ekonomi, Malang, UMM Press

Satrio, Andry, Dampak Subsidi BBM premium terhadap perekonomian Indonesia, <http://id.linkedin.com>, 2014

Teguh, Muhammad, 2014, Matematika Ekonomi, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Wirawan, Nata, 2001, Matematika Ekonomi, Denpasar, Badan Penerbit Unud

Media Lain :

Ditjen Migas. 2011. Statistik Minyak Bumi.

Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Wakil Presiden. 2012. Subsidi BBM Buat Siapa?.

<http://www.bappenas.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bi.go.id>

<http://id.wikipedia.org>

<http://www.opec.org>

<http://esdm.go.id>

<http://bphmigas.go.id>